

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Akbal, Muhammad. 2016. Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Supremasi Universitas Negeri Makassar*. Volume XI Nomor 2, Oktober 2016
- Alter, Catherine & Hage, Jerald. 1993. *Organizations working together Newbury Park*. California: Sage
- Bonso, Hamsah. 2017. *Efektivitas Network governance Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Di Provinsi Papua (Studi Kasus Peraturan Daerah Khusus Tahun 2016)*. Repositori: Thesis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Erni, Daly. 2008. *Pengawasan*. Jakarta: Kencana
- Farmaki, A. 2015. *Regional and sustainable tourism*. Tour Geogia Vol. 17, No. 3
- Fattah Nanang. 2004. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Bina Aksara
- Hadjon, Philipus M. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- Hudalah, Delik. 2017. *Governing industrial estates on Jakarta's periurban area: From shadow government to network governance*. Singapura: *Journal of Tropical Geography* 38 (1), 58-74
- Islamy, M. Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Juhir, Jusuf. 2001. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kansil. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Kartono, Kartini. 2002. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Keban, Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep. Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Klijn & Koppenjan. 2016. *Governance Networks: Concepts, Impacts and Management*. Publisher: Routledge
- Larson, Charles U., 1992. *Persuasion, Reception and Responsibility*. California : Wardsworth
- Maman, Ukas. 2004. *Manajemen: Konsep, Prinsip dan Aplikasi*. Bandung : Penerbit Agnini
- Marbun dan Mahfud. 1987. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty
- Muluk, Khairul. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah. (Sebuah Kajian Administrasi Publik dengan Pendekatan Berpikir Sistem)*. Malang: Bayumedia Publishing
- Osborne, S. 2010. *The New Public Governance?: Emerging Perspective on the Theory and Practice of Public Governance*. New York: Routledge
- Pierr, John. 2000. *Governancem Politics, and The State*. London: Macmillan Press LTD
- Provan, Keith G & Kennis, Patrick. 2015. *Understanding leadership in a world of shared problems: advancing in large landscape conservation. Journal Front Ecol Environ 2016 Vol 14, No. 3*
- Raharja, Sa'mun. 2009. Paradigma Governance dalam Penerapan Manajemen Kebijakan Sektor Publik pada Pengelolaan Sungai Citarum. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Vol 16, No 2, Mei-Agustus 2009*

- Rhodes, RW. 2003. *Peripheral Vision Understanding Governance: Ten Years On*. Australia, Australian National University
- Rukmana, Noviyanti. 2020. *Analisis Governance Network dalam Jaringan Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bone*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Sholihatin, Endang. 2012. Jejaring Pemerintahan di Indonesia: Kekuatan dan Kelemahan. *Surabaya: Jurnal Jejaring Administrasi Publik. Th IV. Nomor 1, Januari-Juni 2012*
- Siagian, Sondang P. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sorensen, Georg. 1993. *Democracy and Democratization: Processes and Prospects in a Changing World*. Aarhus: Westview Press.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.
- Winarno, Budi. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Zaenal, Wirawan. 2019. *Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kota Palopo*. Repository Skripsi: Universitas Hasanuddin.

Sumber lainnya:

- Fajar, 2017. THM Tutup Karena Tak Kantongi SUIP-MB (diakses 16 Maret 2021) <https://fajar.co.id/2017/10/09/thm-tutup-karena-tak-kantongi-siup-mb/>
- Kontan, 2018. Tahun 2018, investasi di sektor pariwisata kian menanjak (diakses 16 Maret 2021) <https://lifestyle.kontan.co.id/news/tahun-2018-investasi-di-sektor-pariwisata-kian-menanjak>

Kontan, 2020. Sepanjang 2019, devisa sektor pariwisata mencapai Rp 280 triliun (diakses 16 Maret 2021) <https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-2019-devisa-sektor-pariwisata-mencapai-rp-280-triliun>

Palopokota, 2019. Pariwisata Palopo, Perlu Bersaing (diakses 16 Maret 2021) <https://www.palopokota.go.id/post/pariwisata-palopo-perlu-bersaing>

Palopopos, 2019. PAD Hanya Rp174 Juta, Pariwisata Diminta Berbenah (diakses 16 Maret 2021) <https://palopopos.co.id/2019/03/pad-hanya-rp174-juta-pariwisata-diminta-berbenah/>

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian PTSP provinsi



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **6005/S.01/PTSP/2022** Kepada Yth.
Lampiran : - Walikota Palopo
Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP PPs UNHAS Makassar Nomor : 1285/UN4.8.1/PT.01.04/2022 tanggal 25 Januari 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **WIRAWAN ZAENAL**
Nomor Pokok : **E062192003**
Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S2)**
Alamat : **Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Makassar**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun Tesis, dengan judul :

**" ANALISIS JARINGAN PEMERINTAHAN DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN
PENGAWASAN TEMPAT HIBURAN MALAM (THM) DI KOTA PALOPO "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **25 Juli s/d 31 Agustus 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 25 Juli 2022

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : **PEMBINA UTAMA MADYA**
Nip : **19630424 198903 1 010**

Tembusan Yth
1. Dekan FISIP PPs UNHAS Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Nomor: 6005/S.01/PTSP/2022

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>

NOMOR REGISTRASI 20220725357157



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*



Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian Departemen Ilmu Pemerintahan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM PASCASARJANA
KAMPUS TAMALANREA
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245
TELEPON (0411) 585 024 /FAX (0411) 585 024

Nomor : 1185 /UN4.B.1/PT.01.04/2022 25 Januari 2022
Lamp. : Proposal Penelitian
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth :
Gubernur Sulawesi Selatan
c.q. Kepala UPT P2T, BKPM
Provinsi Sulawesi Selatan
MAKASSAR

Dengan hormat, kami mohon bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa Program Pascasarjana Fisip Universitas Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :

Nama : Wirawan Zaenal
Nomor Pokok : E062192003
Program : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Penelitian : Analisis Jaringan Pemerintahan Dalam Kebijakan Pengawasan Tempat Hiburan Malam (THM) Di Kota Palopo

Pembimbing : 1. Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos., M.Si.
2. Dr. Phil Sukri, M.Si.

Waktu Penelitian : 25 Januari 2022 - Selesai

Atas izin dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Riset dan Inovasi,
Dr. Phil. Sukri, SIP., M.Si. ✓
Nip. 197508182008011008

Tembusan :

1. Dekan Fisip Unhas, sebagai laporan;
2. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Fisip Unhas;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara Penelitian



Wawancara 1 Kepolisian



Wawancara 2 Dinas Pariwisata



Wawancara 3 Dinas PTSP



Wawancara 4 Satpol PP

Lampran 4 : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS JARINGAN PEMERINTAHAN DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGAWASAN TEMPAT HIBURAN MALAM (THM) DI KOTA PALOPO

Berikut rancangan pertanyaan-pertanyaan wawancara dalam penelitian ini:

KERANGKA	KONSEP	Topik	Pertanyaan
NETWORK GOVERNANCE	KONTAK (<i>CONTACT</i>)	JUMLAH INTERAKSI	Pertanyaan mengenai jenis-jenis interaksi di antara lembaga-lembaga jaringan.
			Pertanyaan mengenai lembaga apa saja yang terlibat dalam interksi tersebut.
			Pertanyaan mengenai agenda apa apa saja yang dibahas dalam interaksi tersebut.
		DURASI & FREKUENSI INTERAKSI	Pertanyaan mengenai intensitas interaksi di antara lembaga-lembaga jaringan.
			Pertanyaan mengenai hal-hal yang menentukan terjadinya interaksi di antara lembaga-lembaga jaringan.
		MANFAAT INTERAKSI	Pertanyaan mengenai output dari masing-masing jenis interkasi.
	Pertanyaan mengenai dampak dari masing-masing jenis interkasi.		
	KEPERCAYAAN (<i>TRUST</i>)	REABILITAS	Pertanyaan mengenai kesepakatan atau komitmen yang telah dibangun dalam jaringan.
Pertanyaan mengenai proses atau dasar pembuatan kesepakatan			

			atau komitmen tersebut.
		KEPERCAYAAN PADA PERJANJIAN & MANFAAT KEKAWATIRAN	Pertanyaan mengenai tingkat kehendak masing-masing lembaga untuk bersikap terbuka terhadap lembaga lain atau terhadap jaringan.
			Pertanyaan mengenai hal-hal yang dikawatirkan masing-masing lembaga terhadap lembaga lain atau pada jaringan.
			Pertanyaan mengenai tingkat kesiapan masing-masing lembaga untuk menanggung resiko dari kepentingan jaringan.
			Pertanyaan mengenai hal-hal yang diharapkan terjadi/terwujud pada <i>network governance</i> tersebut.
			Pertanyaan mengenai seberapa penting dan seberapa seringnya dilakukan usaha untuk saling memperingati atau memberi saran antar lembaga dalam rangka menghindari resiko/mendorong keberhasilan masing-masing dan jaringan.
		KETIADAAN PERILAKU OPORTUNIS	Pertanyaan mengenai seberapa memungkinkan terjadinya perilaku oportunistik (menggambil kesempatan untuk menguntungkan diri sendiri) pada jaringan.
			Pertanyaan mengenai perilaku-perilaku oportunistik yang pernah terjadi pada aktivitas jaringan.
			Pertanyaan mengenai strategi atau sikap yang telah dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik.
			Pertanyaan mengenai sikap atau ganjaran yang diberikan terhadap lembaga yang diketahui telah melakukan perilaku oportunistik.

		KEPERCAYAAN PADA KEMAUAN BAIK	Pertanyaan mengenai tingkat kepercayaan lembaga terhadap efektifitas model jaringan pemerintahan yang berlangsung.
	BERBAGI INFORMASI (SHARING INFORMATION)	CAKUPAN INFORMASI	Pertanyaan mengenai informasi atau data-data apa saja yang perlu tersedia pada jaringan.
			Pertanyaan mengenai ketersediaan basis data yang dibutuhkan lembaga untuk menunjang aktivitas/tujuan jaringan.
			Pertanyaan mengenai ketersediaan masing-masing Lembaga untuk memberikan informasi penting yang dibutuhkan dalam menunjang aktivitas/tujuan jaringan.
		KUALITAS INFORMASI	Pertanyaan mengenai anggapan Lembaga terhadap tingkat akurasi data atau informasi yang dimiliki
PERTUKARAN SUMBER DAYA (RESOURCE EXCHANGE)	PERTUKARAN SUMBER DAYA MANUSIA & SARANA-PRASARANA	Pertanyaan mengenai keterbatasan lembaga tersebut yang dapat ditopang oleh lembaga lain (dan sebaliknya)	
		Pertanyaan mengenai hambatan yang seringkali ditemui dalam proses pertukaran sumber daya atau sarana-prasarana.	